

KELEMBAGAAN POKMASWAS: EVALUASI PERAN AKTIF DALAM PENGAWASAN SUMBER DAYA DAN KELAUTAN DI KECAMATAN PULAU HARUKU

POKMASWAS INSTITUTIONS: EVALUATING ACTIVE ROLES IN THE SURVEILLANCE OF MARINE AND FISHERIES RESOURCES IN HARUKU ISLAND DISTRICT

Revalda A. Y. B. Salakory^{1*}, Yoisy Lopulalan²

¹Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur

²Program Studi Agrobisnis Perikanan, Universitas Pattimura

*Penulis korespondensi: r.salakory93@gmail.com

Received Manuscript: 05 Januari 2026

Final Revision: 16 Januari 2026

Approved: 23 Februari 2026

Online Access: 26 Februari 2026

Published: 30 Juni 2026

ABSTRAK

Tingginya tingkat kerawanan *destructive fishing* di Pulau Haruku mengindikasikan belum optimalnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting dalam mendukung pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sehingga terbentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Selanjutnya sejauh mana keterlibatan kelembagaan Pokmaswas dapat dilihat melalui evaluasi peran aktifnya dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*). Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan Indeks Keaktifan. Keaktifan Pokmaswas dapat dianalisis sesuai beberapa kriteria yakni ikut serta dalam patrol pengawasan, mengikuti kegiatan sosialisasi/pembinaan Pokmaswas, berkoordinasi dengan instansi terkait, melakukan penyadartahuan kepada masyarakat sekitar, melakukan rapat rutin dan kegiatan lain yang mendukung kebijakan kelautan dan perikanan. Pokmaswas di Kecamatan Pulau Haruku termasuk dalam kategori sangat aktif dalam menjalankan perannya mengikuti sosialisasi dan pembinaan dari instansi terkait dengan nilai indeks keaktifan mencapai 78,18%. Pokmaswas dengan tingkat keaktifan tertinggi Pelasona dan Hasroka dengan rata-rata nilai indeks mencapai 92,36% dan 91,37% dan dikategorikan sangat aktif dengan kriteria akti. Dengan demikian diperlukan kerjasama terintegrasi antar instansi terkait baik dari pihak Pemerintah Pusat dan Daerah maupun NGO dalam pelaksanaan pembinaan dan edukasi, pelatihan teknis, penyediaan sarana dan prasarana penunjang serta pemberian penghargaan/*reward* kepada pokmaswas dengan terbaik dengan syarat dan ketentuan yang mudah dipenuhi.

Kata Kunci : Peran aktif, pokmaswas, pengawasan, perikanan, merusak

ABSTRACT

The high prevalence of destructive fishing on Haruku Island indicates that the management and surveillance of marine and fisheries resources have not yet reached an optimal level. Community engagement is critical to supporting these monitoring efforts, which has led to the establishment of Community Surveillance Groups (Pokmaswas). The extent of institutional involvement by Pokmaswas can be measured by evaluating their active contribution to the oversight of marine and fisheries resources. This research employs a mixed-methods approach. Data analysis was conducted using descriptive methods and an activity Index. The performance of Pokmaswas was evaluated based on several criteria: participation in surveillance patrols, attendance at socialization and capacity building sessions, coordination with relevant authorities, community outreach and awareness-raising, conducting regular meetings, and other activities that support marine and fisheries policies. Pokmaswas in the Haruku Island District is categorized as highly active in fulfilling its role, particularly in participating in socialization and training provided by relevant agencies, with an activity index of 78.18%. The groups with the highest activity levels are Pelasona and Hasroka, with average index values of 92.36% and 91.37%, respectively, both classified as highly active. Consequently, integrated cooperation is required among relevant stakeholders including Central and Regional Governments as well as NGOs to provide ongoing guidance, technical training, the provision of supporting infrastructure, and the implementation of incentive or reward programs for high-performing groups under accessible terms and conditions.



Keyword : *Active Role, Pokmaswas, Surveillance, Fisheries, Destructive*

Cara sitasi: Salakory, R., & Lopulalan, Y. 2026. Kelembagaan Pokmaswas: Evaluasi Peran Aktif Dalam Pengawasan Sumber Daya Dan Kelautan Di Kecamatan Pulau Haruku. PAPALELE: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, 10(1), 11-17, DOI: <https://doi.org/10.30598/papalele.2026.10.1.11/>

PENDAHULUAN

Upaya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dilakukan terus – menerus dan bersifat merusak, dapat menjadi ancaman bagi keseimbangan dan kelestarian ekosistem perairan. Salah satu ancaman terhadap kelestarian ekosistem adalah penggunaan alat tangkap yang merusak (*destructive fishing*). Terindikasi, nelayan lebih memilih menggunakan bahan peledak, racun, setrum maupun metode lainnya dalam penangkapan ikan dikarenakan minimnya biaya yang harus dikeluarkan namun menghasilkan volume tangkapan yang besar (Grahadyarini, 2019). Hal ini tentunya berdampak jangka panjang terhadap kelestarian ekosistem perairan, terutama terumbu karang. Kerusakan terumbu karang akibat *destructive fishing* ditandai dengan kondisi karang yang patah hingga kematian karang, kemudian menyebabkan menurunnya jasa lingkungan yang dihasilkan hingga terganggunya siklus hidup ikan, yang nantinya bermuara pada penurunan hasil tangkapan nelayan (Asri *et al*, 2019).

Provinsi Maluku tergolong dalam lokasi rawan *destructive fishing* dengan kategori sedang dengan jumlah temuan 1 kasus (KKP RI, 2019). Namun hal ini dinilai kontradiktif mengingat banyak sekali kejadian *destructive fishing* yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku selaku Instansi Pembina. Mengacu pada Laporan Rencana Aksi Daerah Penangkapan Ikan yang merusak Tahun 2020, teridentifikasi lokasi dengan tingkat kerawanan sedang hingga tinggi yaitu Kabupaten Maluku Tengah pada perairan Kecamatan Seram Utara, Seram Utara Timur, Amahai, Tehoru, Banda, Leihitu dan Pulau Haruku (DKP Maluku, 2020). Pulau Haruku merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan *destructive fishing* yang tinggi. Tingginya tingkat kerawanan *destructive fishing* di Pulau Haruku mengindikasikan belum optimalnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Keterbatasan anggaran untuk pengawasan serta jumlah Pengawas Perikanan dan Polsus tidak sebanding dengan wilayah kerja yang luas, menjadi faktor penyebab belum optimalnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Perairan Pulau Haruku.

Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting dalam mendukung pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengingat masyarakat lebih mengenal kondisinya. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dibentuk untuk membantu pemerintah dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip 3M yaitu melihat/mendengar, mencatat dan melaporkan. Selanjutnya sejauh mana keterlibatan Kelembagaan Pokmaswas dapat dilihat melalui evaluasi peran aktifnya dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Hasil dari evaluasi ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas Pokmaswas dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang terintegrasi di Kecamatan Pulau Haruku.

METODOLOGI

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada empat wilayah di Kecamatan Pulau Haruku yaitu Negeri Haruku, Rohomoni, Aboru dan Waimital. Pulau Haruku dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan tingginya aktivitas *destructive fishing* di wilayah ini. Waktu pelaksanaan penelitian selama 6 bulan dari Juli sampai Desember 2024.

Jenis dan Metode Pengambilan Data

Penelitian evaluasi peran aktif Pokmaswas dalam pengawasan SDKP menggunakan metode campuran (*mixed method*) dengan mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Adapun metode pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.





Gambar 1. Lokasi Penelitian

Metode Pengambilan Sampel

Populasi adalah seluruh anggota dari 4 (empat) Pokmaswas yang berjumlah 40 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 8 orang terdiri dari Ketua dan Sekretaris dari setiap kelompok, yang dipilih berdasarkan pertimbangan (*purposive sampling*) bahwa Ketua dan Sekretaris menjalankan fungsi yang dominan dalam berkoordinasi dengan instansi Pembina serta dianggap sudah mewakili pendapat dari anggota kelompok yang lain.

Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan Indeks Keaktifan (IK). Kemudian Indeks Keaktifan (IK) dihitung berdasarkan rumus yang diadopsi dari Niode *et al*, 2023 berikut:

$$IK = \frac{\text{Total Skor} / \text{Skor Maksimum}}{\text{Jumlah Responden}} \times 100\%$$

Indeks Keaktifan (IK) selanjutnya dikelompokkan dalam kategori berikut:

Nilai Indeks dan Kategori	
0% - 25% (Tidak Aktif)	50,2% - 75,2% (Aktif)
25,1% - 50,1% (Kurang Aktif)	75,3% - 100% (Sangat Aktif)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan Pokmaswas

Pokmaswas adalah komponen masyarakat yang anggotanya berasal dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), nelayan, anak buah kapal-kapal penangkap ikan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya termasuk Anak Buah Kapal (ABK) penangkap ikan, yang ikut serta membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sekaligus bertugas sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah. Kelembagaan pokmaswas setidaknya terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang dipilih langsung oleh para anggota kelompok bersama - sama dengan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian, pokmaswas di Kecamatan Pulau Haruku berjumlah 4 (empat) kelompok



yaitu Hasroka, Uku Ha'a, Pelasona dan Namalatu Kalaju. Pokmaswas dapat dibentuk dengan jumlah anggota minimal 10 orang, berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Adapun kegiatan pokok yang dilakukan adalah pengawasan perairan termasuk didalamnya pengawasan terhadap penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pemasaran ikan yang terindikasi hasil pemboman atau penangkapan ilegal, pelestarian ekosistem perairan atau kawasan konservasi dan pencemaran perairan. Dalam menjalankan tugasnya, dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai upaya perlindungan hukum bagi kelompok.

Peran Aktif Pokmaswas dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan

Pokmaswas sebagai pelaksana pengawasan di tingkat lapangan, menjalankan prinsip 3 M yaitu melihat atau mendengar, Mencatat dan Melaporkan (USAID, 2020). Adapun peran pokmaswas dalam pengawasan SDKP dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mendengar/melihat: Pokmaswas mendapat pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran perikanan atau melihat kejadian secara langsung, yaitu penangkapan ikan Lalosi dengan menggunakan bahan peledak (bom) di Perairan antara Negeri Rohomoni dan Kabauw yang dilakukan oleh Nelayan yang berasal dari Negeri Kailolo.
2. Mencatat: (a) Pokmaswas mengisi *logbook* atau buku harian yang memuat semua aktivitas kelompok yang berkaitan dengan patroli pengawasan, pembinaan pokmaswas, koordinasi dengan instansi terkait, sosialisasi atau penyadartahuan terhadap masyarakat serta rapat rutin kelompok, (b) mendokumentasikan hasil temuan pada saat pengawasan berlangsung.
3. Melaporkan: Pokmaswas wajib melapor kepada Petugas Penegak Hukum yaitu Penyidik Perikanan (PPNS), Pengawas Perikanan, Polsus WP3K, Babinkamtibmas, Babinsa Satpol-AIRUD, Polisi dan TNI AL. Selain itu, pokmaswas juga dapat melakukan pelaporan melalui *Whatsapp Group* Pengawasan yang dibentuk oleh DKP Provinsi Maluku maupun *SMS Gateway* yang memuat jenis pelanggaran, lokasi, waktu kejadian, identitas kapal atau pelanggar (jika ada) dan identitas pelapor. Meski demikian, dalam penanganan kasus *destructive fishing* terkendala dengan tidak bersedianya anggota pokmaswas maupun masyarakat untuk menjadi saksi untuk memberikan keterangan dikarenakan beberapa alasan personal serta laporan yang disampaikan tidak menyertakan bukti dukung yang kongkrit sehingga sering dianggap sebagai asumsi.

Mengacu pada Kepdirjen PSDKP Nomor 12 Tahun 2024, Pokmaswas dinilai aktif dalam menjalankan perannya apabila memiliki kriteria berikut (Dirjen PSDKP, 2024):

1. Ikut serta dalam kegiatan Patroli Pengawasan.
Patroli pengawasan bersama dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku selaku instansi pembina, UPT. PSDKP dan LSM Mitra Dinas. Selain patroli bersama, pokmaswas juga melakukan patroli mandiri dengan menggunakan *speedboat* bantuan dari pemerintah seperti pokmaswas Pelasona. Selain pengawasan di laut, Pokmaswas juga berperan dalam memantau pemasaran ikan yang termasuk dalam jenis dilindungi maupun penangkapannya dengan bom maupun racun (*potassium*).
2. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas.
Kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang umumnya diikuti oleh Pokmaswas erat kaitannya dengan penguatan penguatan peran dan kapasitas Pokmaswas dalam SISMASWAS. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pedoman, bimbingan, konsultasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh pokmaswas, guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif kelompok dalam pengawasan SDKP. Selain itu, dengan adanya kegiatan sosialisasi dan pembinaan, Pokmaswas dapat terbantu dalam menyalurkan masalah serta hambatan yang dihadapi sehingga diharapkan setelah ini, Pokmaswas dapat terbantu dalam ketersediaan Kartu Tanda Anggota (KTA), Perahu, Perlengkapan dan Seragam dalam menunjang tugas dan fungsinya dalam Pengawasan SDKP.
3. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait.
Salah satu peran yang menjadi tolak ukur keaktifan Pokmaswas adalah rutin berkoordinasi dengan DKP Maluku selaku instansi pembina. Untuk mempermudah komunikasi dengan Pokmaswas, DKP



Maluku melalui Bidang Pengawasan SDKP telah menyediakan Whatsapp Group dimana Perwakilan dari setiap Pokmaswas dapat melaporkan kegiatan yang telah dilakukan maupun masalah dan hambatan serta kegiatan insidental yang terjadi. Selain melalui WAG, Pokmaswas juga dapat berkoordinasi dengan DKP Maluku melalui Cabang Dinas di Gugus Pulau VII (Ambon dan Pulau – Pulau Lease) serta Pengawas Perikanan dan Polsus WP3K.

4. Membantu Melakukan Sosialisasi/Penyadartahuan terhadap Masyarakat.

Bentuk penyadartahuan kepada masyarakat dilaksanakan Pokmaswas melalui kegiatan sosialisasi ke sekolah maupun kepada masyarakat yang sedang berada di pesisir pantai pada saat Pokmaswas melakukan patroli pengawasan, yaitu tentang biota/jenis ikan yang dilindungi, larangan membuang sampah di laut dan pesisir dan pantai, bahaya penggunaan bom dan racun pada ekosistem laut serta peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP di Pulau Haruku. Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian wilayah pesisir dan laut.

5. Melakukan Rapat Rutin Kelompok.

Rapat rutin Pokmaswas umumnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan di rumah Ketua Kelompok. Rapat kelompok menjadi wadah untuk bermusyawarah dan berbagi informasi antar sesama anggota sekaligus melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.

6. Kegiatan lainnya yang mendukung kebijakan kelautan dan perikanan seperti kerja bakti untuk bersih pantai, ikut serta dalam rapat musyawarah desa, mengikuti pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten, ikut serta dalam pendataan kapal, ikut serta dalam rapat atau kegiatan yang berkaitan dengan penegak hukum.

Evaluasi Peran Aktif Pokmaswas

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana Pokmaswas melaksanakan peran dan keaktifannya dalam pengawasan SDKP di Kecamatan Pulau Haruku. Selanjutnya, hasil evaluasi peran pokmaswas di Kecamatan Pulau Haruku dapat dilihat tabel 1.

Tabel 1. Evaluasi Peran Aktif Pokmaswas

No	Peran Pokmaswas	Nilai Indeks (%)	Kategori
1.	Ikut serta dalam kegiatan patroli pengawasan	78,08	Sangat Aktif
2.	Mengikuti sosialisasi dan pembinaan pokmaswas	78,17	Sangat Aktif
3.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	78,08	Sangat Aktif
4.	Melakukan sosialisasi/penyadartahuan terhadap masyarakat	69,79	Aktif
5.	Melakukan rapat rutin kelompok	76,69	Sangat Aktif
6.	Kegiatan lain yang mendukung kebijakan kelautan dan perikanan	69,89	Aktif

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 2, diketahui Pokmaswas di Kecamatan Pulau Haruku termasuk dalam kategori sangat aktif dengan nilai indeks keaktifan tertinggi yaitu sekitar 78,18% dalam menjalankan perannya untuk mengikuti sosialisasi dan pembinaan dari instansi terkait baik dari DKP Maluku, Stasiun PSDKP KKP, maupun Anggota DPR RI. Sedangkan kriteria dengan nilai indeks terendah yaitu sekitar 69,79% dan termasuk dalam kategori aktif adalah membantu melakukan penyadartahuan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian SDKP. Hal ini dikarenakan pokmaswas belum teredukasi dan terfasilitasi secara optimal dalam peningkatan kapasitasnya sehingga belum mampu dalam melakukan penyadartahuan atau sosialisasi kepada masyarakat di sekitarnya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Pokmaswas di Kecamatan Pulau Haruku sangat aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan oleh instansi terkait dan aktif membantu melakukan penyadartahuan kepada masyarakat.

Selanjutnya, untuk mengetahui sejauhmana tingkat keaktifan dari setiap kelompok. Selanjutnya, evaluasi peran aktif berdasarkan kelompok dijelaskan pada tabel 2.



Tabel 2. Evaluasi Peran Aktif Berdasarkan Kelompok

No	Pokmaswas	Rata – Rata Nilai Indeks Keaktifan (%)	Kategori
1.	Hasroka	91.37	Sangat Aktif
2.	Pelasona	92.36	Sangat Aktif
3.	Namalatu Kalaju	66.67	Aktif
4.	Uku Ha'a	50.00	Kurang Aktif

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Dari tabel 3, dapat dilihat bahwa Pokmaswas dengan tingkat keaktifan tertinggi dalam menjalankan perannya adalah Pelasona dan Hasroka dengan rata-rata nilai indeks mencapai 92,36% dan 91,37% (sangat aktif), diikuti oleh Namalatu Kalaju dengan nilai indeks sebesar 66,67% dan Uku Ha'a sebesar 50%. Hasroka dan Pelasona dikategorikan sangat aktif dalam menjalankan perannya dalam pengawasan SDKP dikarenakan beberapa hal yaitu: (1) keduanya sudah terbentuk sekitar 3 – 4 tahun sehingga telah memenuhi syarat untuk bantuan berupa perlengkapan, seragam serta perahu pengawas dari DKP Maluku selaku instansi Pembina sehingga tidak kesulitan dalam melakukan pengawasan baik di pesisir pantai maupun laut (patroli mandiri), (2) rutin berkoordinasi dan berkomunikasi dengan DKP Maluku, Stasiun PSDKP dan LSM. Terkait baik secara langsung maupun melalui WA Group sehingga lebih mudah untuk dilibatkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh instansi, seperti Pokmaswas Pelasona dan Hasroka yang setiap tahunnya dilibatkan dalam kegiatan Patroli di Perairan Pulau Haruku bersama *Coral Triangle Center (CTC)* serta (3) kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian pesisir dan laut mengingat Desa Haruku dan Rohomoni merupakan lokasi rawan *destructive fishing*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pokmaswas di Kecamatan Pulau Haruku berjumlah 4 (empat) kelompok yaitu Hasroka (Negeri Rohomoni), Uku Ha'a (Negeri Aboru), Pelasona (Negeri Haruku) dan Namalatu Kalaju (Dusun Waimital). Peran aktif Pokmaswas ditunjukkan dengan ikut serta dalam patroli pengawasan, mengikuti kegiatan sosialisasi/pembinaan pokmaswas, berkoordinasi dengan instansi terkait, melakukan penyadartahuan kepada Masyarakat, melakukan rapat rutin kelompok dan melakukan kegiatan lain yang mendukung kebijakan kelautan dan perikanan. Pokmaswas di Kecamatan Pulau Haruku termasuk dalam kategori sangat aktif dengan nilai indeks keaktifan mencapai 78,18%. Pokmaswas dengan kategori sangat aktif adalah Pelasona dan Hasroka.

Saran

Untuk meningkatkan peran aktif Pokmaswas dalam pengawasan SDKP, diperlukan kerjasama yang terintegrasi antar instansi terkait baik dari pihak Pemerintah Pusat dan Daerah maupun NGO dalam pelaksanaan pembinaan dan edukasi, pelatihan teknis, penyediaan sarana dan prasarana penunjang serta pemberian penghargaan/*reward* kepada pokmaswas dengan terbaik dengan syarat dan ketentuan yang mudah dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, M., Wahyuni, E. S. dan Satria, A. 2019. Praktik Perikanan Destruktif (Studi Kasus pada Taman Nasional Taka Bonarate). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Bogor
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. 2020. *Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD): Penanggulangan Aktifitas Destructive Fishing*. DKP Maluku. Ambon
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. 2024. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024. Ditjen PSDKP. Jakarta
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2019. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan



- dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019 – 2023. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jakarta
- Niaode, I., Loho, A.E. dan Jocom, S. G. 2023. Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian pada Era New Normal di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Agrisosioekonomi: Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan, Sosial dan Ekonomi)*. Manado
- United States Agency for International Development (USAID). 2020. *Buku Saku Pokmaswas: Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat dan Peran Kelompok Masyarakat Pengawas dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Berkelanjutan*. USAID Sea. Jakarta.

